

# REFORMASI PAKTA UNI EROPA TERKAIT KEBIJAKAN MIGRASI DAN SUAKA DALAM UPAYA MENGATASI PENYELUNDUPAN MIGRAN

Imanda Krismayanti Sitompul  
Universitas Sriwijaya  
imandasitompul@gmail.com

**Abstract** – *This research aims to analyze the EU Migration and Asylum Pact Reform 2024 to address the increasing challenges of migration and human smuggling. The phenomenon of global migration triggered by armed conflict, climate change, and economic inequality has encouraged the European Union to formulate more effective and sustainable migration policies. This research uses a qualitative method with a constructivist paradigm that focuses on how migration policies are shaped through social and political interactions between the actors involved. The results show that although the reform aims to create a fairer and more efficient migration system, implementation challenges remain significant. Political tensions between member states are a major obstacle, especially regarding differing views on refugee quota obligations. In addition, the readiness of the administrative infrastructure in some member states remains an obstacle to implementing this policy effectively. It can be concluded that the EU Migration and Asylum Pact Reform 2024 is a significant step towards a more structured and solidarity-based migration system. However, the EU's inability to reach a full consensus on the implementation of these reforms, mainly due to the opposition of some member states such as Poland and Hungary to migrant redistribution mechanisms, has the potential to undermine the principle of solidarity at the core of these policies. A strict migration policy could exacerbate the EU's internal fragmentation if these political differences are not resolved.*

**Keywords:** *Reform, Migration and Asylum Pact, European Union, illegal migration, human trafficking.*

**Abstrak** – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Reformasi Pakta Migrasi dan Suaka Uni Eropa 2024 dalam upaya mengatasi tantangan migrasi dan penyelundupan manusia yang semakin meningkat. Fenomena migrasi global yang dipicu oleh konflik bersenjata, perubahan iklim, serta ketimpangan ekonomi telah mendorong Uni Eropa untuk merumuskan kebijakan migrasi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan paradigma konstruktivisme yang berfokus pada bagaimana kebijakan migrasi dibentuk melalui interaksi sosial dan politik antaraktor yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun reformasi ini

bertujuan untuk menciptakan sistem migrasi yang lebih adil dan efisien, tantangan implementasi tetap signifikan. Ketegangan politik antar negara anggota menjadi hambatan utama, terutama terkait perbedaan pandangan mengenai kewajiban kuota pengungsi. Selain itu, kesiapan infrastruktur administratif di beberapa negara anggota masih menjadi kendala dalam menerapkan kebijakan ini secara efektif. Kesimpulannya, Reformasi Pakta Migrasi dan Suaka Uni Eropa 2024 menunjukkan langkah signifikan menuju sistem migrasi yang lebih terstruktur dan berbasis solidaritas. Namun, ketidakmampuan Uni Eropa untuk mencapai konsensus penuh dalam implementasi reformasi ini, terutama karena penolakan dari beberapa negara anggota seperti Polandia dan Hungaria terhadap mekanisme redistribusi migran, berpotensi melemahkan prinsip solidaritas yang menjadi inti kebijakan ini. Jika perbedaan politik ini tidak diselesaikan, kebijakan migrasi ketat dapat memperparah fragmentasi internal Uni Eropa.

**Kata Kunci:** Reformasi, Pakta Migrasi dan Suaka, Uni Eropa, migrasi ilegal, penyelundupan manusia.

## I. PENDAHULUAN

Migrasi global telah menjadi fenomena yang semakin kompleks akibat berbagai faktor multidimensional yang saling berkelindan. Konflik bersenjata di berbagai belahan dunia telah memicu gelombang perpindahan manusia dalam jumlah besar sehingga memaksa mereka mencari perlindungan di negara-negara yang lebih stabil (Jamal et al., 2022). Perubahan iklim juga berkontribusi terhadap peningkatan migrasi dengan menyebabkan bencana alam, degradasi lingkungan, dan kelangkaan sumber daya yang mempersulit kehidupan di daerah asal migran. Ketimpangan ekonomi yang tajam antara negara berkembang dan negara maju menjadi faktor lain yang mendorong individu untuk berpindah guna mencari peluang yang lebih baik. Pergerakan manusia lintas negara memberikan dampak yang signifikan terhadap dinamika sosial dan ekonomi global (Wangke, 2016).

Di beberapa negara penerima bahwa migran memberikan kontribusi besar dalam sektor tenaga kerja khususnya pada pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah banyak.

Migran adalah individu yang berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain, baik dalam satu negara maupun lintas negara, dengan tujuan mencari kehidupan yang lebih baik, perlindungan, atau peluang ekonomi. Kehadiran mereka berkontribusi pada keberagaman budaya serta pertukaran pengetahuan dan keterampilan yang memperkuat hubungan internasional (Fauzan Alamari, 2020). Salah satunya yaitu Krisis migrasi yang melanda Uni Eropa sejak 2015 telah mengubah lanskap sosial dan politik di kawasan ini. Gelombang besar pengungsi yang berasal dari wilayah konflik telah menimbulkan tantangan besar bagi negara-negara anggota dalam mengelola arus migran. Ketimpangan kapasitas antar negara anggota dan peningkatan aktivitas penyelundupan manusia semakin memperburuk situasi ini sehingga memunculkan kebutuhan mendesak untuk reformasi kebijakan migrasi yang lebih efektif (Bast et al., 2023).

Sejak krisis migrasi yang memuncak pada tahun 2015, di mana Uni Eropa telah menghadapi gelombang besar pengungsi yang berasal dari wilayah-wilayah konflik seperti Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Selatan (Wangke, 2016). Pada tahun 2023, angka migrasi ilegal ke Uni Eropa kembali menunjukkan lonjakan signifikan, dengan Jerman menjadi salah satu negara tujuan utama. Menurut laporan yang dirilis oleh Kantor Kepolisian Kriminal Federal (BKA) Jerman pada 21 Agustus 2023 tercatat sekitar 380.200 penyeberangan perbatasan ilegal di wilayah perbatasan eksternal Uni Eropa/Schengen, yang merupakan angka tahunan tertinggi sejak 2016. Lonjakan migrasi ini mencerminkan peningkatan tekanan pada perbatasan Eropa, yang turut mempengaruhi negara-negara anggota dalam mengelola arus migran yang semakin besar. Negara-negara dengan perbatasan eksternal, seperti Italia, Yunani, dan Spanyol merasakan dampak langsung, sementara negara tujuan utama seperti Jerman harus menangani lonjakan jumlah migran yang memasuki wilayah mereka.

Di Jerman, angka migran ilegal yang memasuki negara tersebut pada tahun 2023 tercatat sebesar 266.224 individu yang menunjukkan kenaikan signifikan sebesar 33,4 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Mayoritas migran yang memasuki Jerman berasal dari Suriah, Turki, dan Afghanistan, dengan jumlah kedatangan masing-masing mencapai 54.207, 35.732, dan 35.370. Fenomena ini mengindikasikan bahwa banyak migran yang terpaksa mengandalkan jalur migrasi ilegal sering kali dengan bantuan penyelundup, yang semakin memperburuk situasi di perbatasan.

Keberadaan jaringan penyelundup manusia yang mengeksploitasi kerentanan para migran, menjadikan tantangan dalam mengelola migrasi semakin kompleks (Klöcker & Daumann, 2023). Lonjakan arus migran ini menyoroti perbedaan kapasitas di antara negara-negara anggota dalam menangani pencari suaka dan proses integrasi migran. Negara-negara dengan perbatasan eksternal yaitu seperti Italia, Yunani, dan Spanyol, menanggung beban yang tidak proporsional, mengingat posisi geografis mereka sebagai pintu masuk utama ke Eropa (Setiabudi, 2021). Ketimpangan ini memicu ketegangan internal dalam Uni Eropa, terutama terkait distribusi tanggung jawab dan sumber daya untuk menangani krisis tersebut. Penyalahgunaan jalur migrasi oleh jaringan penyelundup manusia semakin memperparah situasi (Salsabila & Latipulhayat, 2021). Penyelundupan migran melalui Laut Mediterania dan perbatasan darat Balkan meningkat secara signifikan, di mana kelompok kriminal terorganisir memanfaatkan kerentanan individu dengan janji suaka yang menyesatkan.

Kompleksitas permasalahan ini menuntut adanya kebijakan yang bersifat represif dan mampu menciptakan sistem migrasi yang adil dan berkelanjutan. Reformasi Pakta Migrasi dan Suaka Uni Eropa 2024 hadir sebagai langkah strategis untuk menata ulang sistem migrasi yang selama ini dinilai kurang efektif dalam menangani pencari suaka dan penyelundupan manusia. Reformasi Pakta Migrasi dan Suaka Uni Eropa 2024 dirancang untuk mengatasi kelemahan sistem sebelumnya, terutama dalam mendistribusikan tanggung jawab secara lebih adil di antara negara anggota. Pendekatan berbasis solidaritas dan tanggung jawab bersama diterapkan guna mengurangi tekanan pada negara dengan perbatasan eksternal. Reformasi ini mencakup penyaringan perbatasan yang lebih ketat, standarisasi sistem suaka, serta skema redistribusi migran yang lebih seimbang. Kerja sama internasional diperkuat melalui koordinasi dengan negara asal dan transit migran dalam pengamanan perbatasan dan program bantuan ekonomi guna menekan arus migrasi tidak teratur. Dengan pembaruan basis data Eurodac serta peran Frontex dan Interpol dalam pengawasan perbatasan menjadikan kebijakan ini diharapkan mampu menekan penyelundupan manusia sekaligus menciptakan sistem migrasi yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan. Artikel ini akan mengkaji secara kritis bagaimana reformasi kebijakan ini diimplementasikan di lapangan, sejauh mana efektivitasnya dalam menciptakan sistem migrasi yang adil dan berkelanjutan, dan bagaimana

negara-negara anggota menanggapi tanggung jawab baru yang digariskan dalam reformasi tersebut. Oleh karena itu, artikel ini tidak hanya akan menyoroti aspek keamanan tetapi juga menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia para migran dalam kebijakan migrasi Uni Eropa yang baru.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka adalah bagian dari penelitian yang menyajikan ringkasan dan analisis terhadap berbagai literatur atau penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Fungsi utama dari tinjauan pustaka adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai teori-teori yang telah ada, serta untuk mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan (*gap research*) yang dapat dijadikan dasar untuk penelitian selanjutnya. Adapun, Tinjauan pustaka dalam penelitian ini mengacu pada beberapa studi terdahulu yang relevan dalam memahami dinamika kebijakan migrasi dan dampaknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Cici Afriani Jamal, Reni Windiani, dan Satwika Paramasatya (2022) mengkaji kebijakan migrasi Amerika Serikat dalam menetapkan Guatemala sebagai *Safe Third Country* guna mengalihkan pencari suaka ke negara transit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut lebih berorientasi pada keamanan dibandingkan perlindungan migran hal tersebut pada dasarnya sejalan dengan langkah Uni Eropa dalam memperketat pengelolaan migrasi guna membatasi arus migran ilegal.

Selanjutnya, studi Arne Niemann dan Natascha Zaun (2023) menyoroti bagaimana kebijakan migrasi Uni Eropa telah berkembang menjadi instrumen geopolitik yang mengandalkan perjanjian bilateral dan penguatan Frontex untuk mengendalikan migrasi dari negara ketiga. Transformasi ini menjadi landasan bagi reformasi kebijakan migrasi Uni Eropa yang semakin menekankan aspek keamanan dan kerja sama internasional dalam mengatasi penyelundupan manusia.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Estadeo Nurido Andiyani, Nensy Triristina, dan Winda Nurlaily Rafikalia (2024) mengenai *Open Door Policy* di Jerman menunjukkan bahwa kebijakan migrasi yang terlalu longgar dapat memicu ketegangan sosial serta kebangkitan populisme yang terlihat dari meningkatnya dukungan terhadap partai sayap kanan. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan migrasi yang tidak terkelola dengan baik berpotensi

menciptakan instabilitas sosial dan politik, sehingga mendukung urgensi Reformasi Pakta Uni Eropa dalam menciptakan sistem yang lebih terstruktur dan berkeadilan.

Gap penelitian yang terdapat dalam tinjauan pustaka di atas terletak pada keterbatasan dalam menjelaskan implementasi praktis dari kebijakan migrasi yang direformasi khususnya dalam Pakta Migrasi dan Suaka Uni Eropa 2024. Meskipun penelitian terdahulu mengulas bagaimana kebijakan migrasi baik di Amerika Serikat, Uni Eropa, maupun Jerman menghadapi tantangan dalam hal pengendalian arus migrasi dan dampaknya terhadap stabilitas sosial-politik namun sedikit yang membahas secara rinci tentang efektivitas dan dampak jangka panjang dari reformasi kebijakan yang diusulkan oleh Uni Eropa. Penelitian oleh Niemann dan Zaun (2023) mengenai kebijakan migrasi eksternal Uni Eropa dan penelitian oleh Andiyani dkk. (2024) mengenai *Open Door Policy* Jerman memberikan gambaran umum tentang dampak kebijakan yang ada namun tidak secara langsung mengkaji bagaimana reformasi kebijakan terbaru akan menanggulangi masalah penyelundupan migran secara lebih spesifik dan terstruktur.

Penelitian ini berfokus pada *gap* dalam literatur yang ada yaitu bagaimana reformasi Pakta Migrasi dan Suaka Uni Eropa 2024 dapat mengatasi penyelundupan migran, memperbaiki distribusi tanggung jawab antarnegara anggota, serta menciptakan kebijakan yang tidak hanya mengutamakan aspek keamanan, tetapi juga mengutamakan perlindungan hak migran. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang lebih banyak memfokuskan pada kebijakan yang sudah ada atau kebijakan luar negeri seperti *Safe Third Country*, penelitian ini akan mengeksplorasi implementasi praktis dan hasil konkret dari perubahan kebijakan Uni Eropa yang baru dan dampaknya terhadap keberlanjutan sosial dan politik di negara-negara penerima migran. *Gap* ini sangat penting untuk diisi, mengingat tantangan besar yang masih ada terkait dengan penyelundupan migran dan ketegangan sosial-politik yang terjadi di negara tujuan yaitu seperti yang terlihat pada implementasi kebijakan migrasi di Jerman dan negara-negara UE lainnya.

## III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dirancang untuk menggali secara mendalam implementasi reformasi Pakta Migrasi dan Suaka Uni Eropa 2024 dengan fokus pada pengelolaan migrasi dan penyelundupan migran. Penelitian ini mengadopsi pendekatan

kualitatif yang berlandaskan pada paradigma konstruktivisme, yang menganggap bahwa kebijakan migrasi dan penyelundupan manusia dibentuk melalui konstruksi sosial dan interaksi antara berbagai aktor, seperti negara anggota Uni Eropa, badan-badan Uni Eropa, dan migran itu sendiri. Dengan paradigma tersebut penelitian bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut diinterpretasikan dan direspon oleh pihak-pihak terkait dalam ranah sosial, politik, dan hukum yang lebih luas. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan dalam implementasi kebijakan, persepsi tentang efektivitasnya, serta dampak sosial dan politik yang ditimbulkan. Dalam hal teknik pengumpulan data bahwa penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui teknik studi dokumen dan analisis konten. Data sekunder yang digunakan mencakup dokumen kebijakan resmi seperti teks Pakta Migrasi dan Suaka Uni Eropa 2024 dan dokumen-dokumen terkait yang dikeluarkan oleh Uni Eropa dan negara-negara anggota. Artikel dan jurnal ilmiah yang membahas kebijakan migrasi di Uni Eropa dan dampak dari kebijakan tersebut terhadap stabilitas sosial dan politik, juga akan digunakan sebagai referensi untuk mendukung analisis dalam penelitian ini.

Untuk menganalisis data yang terkumpul maka penelitian ini akan menggunakan analisis tematik dan analisis konten. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data, seperti tantangan dalam pengelolaan migrasi, dampak kebijakan terhadap penyelundupan migran, dan efektivitas kebijakan dalam mengurangi arus migrasi ilegal. Sementara itu, analisis konten akan digunakan untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan migrasi diposisikan dalam dokumen kebijakan resmi dan bagaimana kebijakan tersebut diartikulasikan oleh institusi Uni Eropa. Teknik analisis ini akan memberikan wawasan mengenai bagaimana kebijakan ini diterima dan diimplementasikan dalam praktik, serta dampaknya terhadap negara-negara anggota Uni Eropa dan migran yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak dan efektivitas dari reformasi Pakta Migrasi Uni Eropa 2024 dan untuk mengidentifikasi tantangan yang masih dihadapi dalam upaya mengelola migrasi dan mengurangi penyelundupan migran secara lebih efektif.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Proses Reformasi Pakta Migrasi dan Suaka Uni Eropa dalam Pengelolaan Migrasi

Reformasi Pakta Migrasi dan Suaka Uni Eropa 2024 dirancang untuk mengatasi ketidakefisienan dalam sistem migrasi Uni Eropa yang telah ada terutama dalam hal distribusi tanggung jawab di antara negara-negara anggota. Sebelumnya, sistem migrasi Uni Eropa yang berfokus pada Peraturan Dublin III terbukti gagal karena negara-negara yang berada di perbatasan eksternal Uni Eropa yaitu seperti Italia, Yunani, dan Spanyol telah menanggung beban yang tidak proporsional dalam menangani permohonan suaka. Negara-negara ini menjadi titik masuk utama bagi migran sementara negara lain di Uni Eropa tidak memiliki kewajiban yang sama dalam menangani aliran migran tersebut. Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem migrasi yang lebih seimbang dan efisien yang memperkuat solidaritas antar negara anggota dan mengurangi ketegangan yang timbul akibat ketidakseimbangan beban (Kaufmann, 2024).

Reformasi Pakta Migrasi dan Suaka Uni Eropa yang disetujui pada 10 April 2024, merupakan upaya untuk mengatur kembali sistem suaka Uni Eropa yang dinilai disfungsi. Pakta ini dilatarbelakangi oleh krisis migrasi 2015 yang menyebabkan ketegangan antar negara anggota Uni Eropa terutama terkait pembagian beban pengungsi dan migrasi ilegal (Wolff, 2024). Tujuan utama dari reformasi ini adalah untuk menciptakan sistem pengelolaan suaka yang lebih homogen dan dapat diprediksi yang juga menyertakan mekanisme solidaritas untuk membagi beban antara negara-negara anggota Uni Eropa. Reformasi ini berfokus pada pengelolaan pencari suaka yang tidak sah bukan migrasi secara umum. Artinya, kebijakan tersebut tidak mencakup upaya untuk menangani kekurangan tenaga kerja atau kebijakan untuk menarik migran ke sektor tertentu seperti pertanian atau kesehatan. Migrasi ilegal yang tidak berkaitan dengan suaka tetap berada di bawah kewenangan negara masing-masing meskipun adanya kebebasan bergerak di kawasan Schengen memaksa negara-negara untuk melakukan koordinasi.

Adapun *timeline* dari Pakta Migrasi dan Suaka Uni Eropa mulai dari usulan Komisi pada 2020 hingga adopsi oleh Dewan Uni Eropa pada Mei 2024. Tabel ini merangkum berbagai langkah penting dalam reformasi kebijakan migrasi Uni Eropa termasuk regulasi baru dan mekanisme solidaritas antar negara anggota.

**TABEL I**

*Timeline* dan pencapaian utama Pakta Migrasi dan Suaka yang baru:

<b>September 2020</b>	<b>Usulan Komisi tentang Pakta Baru tentang Migrasi dan Suaka</b>
<b>Oktober 2021</b>	Penerapan Arahkan Kartu Biru Uni Eropa yang Direvisi
<b>Desember 2021</b>	Adopsi Badan Suaka Uni Eropa
<b>Maret 2022</b>	Penunjukan Koordinator Pengembalian Uni Eropa
<b>April 2022</b>	Usulan Komisi mengenai paket Keterampilan dan Bakat
<b>Juni 2022</b>	Peluncuran Mekanisme Solidaritas Sukarela
<b>Desember 2022</b>	Perjanjian sementara tentang Peraturan Kualifikasi
	Perjanjian sementara tentang Arahkan Kondisi Penerimaan
	Perjanjian sementara tentang Peraturan Kerangka Pemukiman Kembali Uni Eropa
<b>Desember 2023</b>	Perjanjian sementara tentang Peraturan Eurodac
	Perjanjian sementara tentang Peraturan Penyarangan
	Perjanjian sementara tentang Peraturan Prosedur Suaka
	Perjanjian sementara mengenai Arahkan Izin Tunggak
	Perjanjian sementara tentang Peraturan Manajemen Suaka dan Migrasi
	Perjanjian sementara tentang Crisis Regulation
	Kesepakatan politik
<b>April 2024</b>	Pemungutan suara Parlemen Eropa
<b>Mei 2024</b>	Diadopsi oleh Dewan Uni Eropa

Sumber: *European Commission, 2024*

Pakta ini mencakup lima regulasi utama yang disusun dalam lebih dari 2.000 halaman yang mencakup pengelolaan perbatasan eksternal, prosedur suaka yang lebih terstandarisasi, dan redistribusi beban di antara negara-negara anggota. Dua regulasi utama yang disetujui lebih dahulu adalah regulasi penyarangan yang bertujuan untuk harmonisasi pemeriksaan identitas dan keamanan di perbatasan serta pembaruan sistem basis data Eurodac yang digunakan untuk mencegah penyalahgunaan suaka dan memantau pergerakan migran di dalam Uni Eropa. Namun, masih terdapat perbedaan pandangan antar negara anggota, terutama antara negara-negara Eropa Selatan, yang menginginkan solidaritas lebih besar, dan negara-negara Eropa Timur seperti Polandia dan Hongaria yang menentang kewajiban kuota pengungsi. Meskipun regulasi solidaritas diatur wajib, implementasinya bersifat fleksibel, dengan negara yang tidak menerima migran bisa memilih untuk membayar denda atau mendukung program di negara asal migran (Enríquez, 2024).

Salah satu tujuan utama dari reformasi ini adalah untuk mencegah masuknya migran yang

tidak memenuhi syarat untuk suaka dengan menetapkan prosedur ketat di perbatasan yang mengharuskan mereka untuk ditahan di fasilitas tertentu hingga 12 minggu sementara klaim mereka diperiksa. Migran yang berasal dari negara dengan tingkat pengakuan suaka rendah akan lebih cepat diekspulsi. Penggunaan prosedur yang lebih ketat ini dimaksudkan untuk mempercepat pengelolaan permohonan suaka dan mengurangi beban negara-negara dengan perbatasan eksternal. Penting untuk dicatat bahwa Pakta Migrasi ini memperkenalkan konsep negara ketiga yang aman, yang memungkinkan negara anggota untuk mengembalikan pencari suaka ke negara tempat mereka memiliki koneksi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah orang yang mencari suaka di Uni Eropa dan memfokuskan upaya pada negara ketiga yang dianggap aman bagi migran tersebut (European Commission, 2024).

Walaupun reformasi ini mencakup beberapa langkah untuk meningkatkan solidaritas kebijakan ini tetap mendapat kritik dari banyak organisasi hak asasi manusia. Salah satunya adalah kekhawatiran bahwa kebijakan ini dapat mengarah pada peningkatan jumlah deportasi yang tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia. Organisasi-organisasi ini memperingatkan bahwa pengembalian migran ke negara-negara yang tidak aman atau dipaksa tinggal di fasilitas penahanan dapat melanggar hak-hak mereka. Reformasi ini juga tidak menyelesaikan beberapa masalah utama dalam pengelolaan migrasi, seperti pengembalian migran yang gagal. Hanya sekitar 20% dari migran yang ditolak dapat dipulangkan sesuai dengan peraturan yang ada. Sebagian besar migran yang ditolak tetap berada di Uni Eropa dalam status yang tidak jelas dengan menambah ketegangan politik dan sosial (Essarraoui, 2024).

Pakta Migrasi ini lebih fokus pada pengelolaan di dalam Uni Eropa dan tidak secara langsung menangani masalah migrasi dari negara ketiga. Kerja sama dengan negara-negara asal migran sangat bergantung pada kesepakatan bilateral yang sering kali lemah atau tidak ada sama sekali. Tanpa perjanjian yang kuat, pemulangan migran ke negara asal akan tetap menjadi tantangan besar. Meskipun Pakta Migrasi ini diharapkan dapat membawa penyelesaian terhadap masalah migrasi yang telah lama mengemuka, implementasinya akan sangat bergantung pada kesediaan negara-negara anggota untuk bekerja sama. Terdapat keraguan besar mengenai kemampuan Uni Eropa untuk menanggapi tekanan migrasi yang terus meningkat, terutama dengan adanya ketegangan politik yang masih tinggi terkait kebijakan ini. Pakta Migrasi dan

Suaka Uni Eropa 2024 menciptakan kerangka yang lebih terstruktur dan sistematis untuk mengelola migrasi di Eropa. Meskipun demikian bahwa tantangan besar terkait dengan penerimaan pengungsi, pengelolaan solidaritas, dan pelaksanaan kebijakan di tingkat nasional masih harus dihadapi terutama mengingat perbedaan pendapat antara negara-negara anggota Uni Eropa dan ketidakpastian dalam penerapan kebijakan ini di masa depan.

Pakta Migrasi dan Suaka Uni Eropa yang baru mendapat banyak kritik meskipun diklaim sebagai solusi terhadap tantangan migrasi yang ada. Banyak yang berpendapat bahwa pakta ini lebih mengutamakan kontrol ketat terhadap migrasi dibandingkan dengan solusi yang berbasis pada aspek kemanusiaan. Beberapa kritik utama datang dari cara pandang pakta terhadap migran, yang dapat dilihat dari tiga kerangka utama: klasifikasi manusia, koordinasi spasial, dan kontrol temporal, yang semuanya berisiko mengurangi martabat dan agensi migran. Salah satu kritik terbesar terhadap pakta ini adalah soal klasifikasi manusia. Migran sering kali dilihat hanya sebagai data atau statistik yang diproses oleh pemerintah. Bahasa yang digunakan dalam pakta cenderung lebih fokus pada keamanan dan risiko, daripada melihat migran sebagai individu dengan hak dan martabat yang harus dihormati. Klasifikasi ini berpotensi menyebabkan perlakuan yang tidak adil terhadap migran, karena mereka lebih dipandang berdasarkan kategori statistik, bukan berdasarkan kebutuhan dan hak mereka sebagai manusia (Häkli et al., 2024).

Koordinasi spasial juga menjadi isu utama dalam pakta ini. Uni Eropa berusaha mengontrol pergerakan migran, baik di dalam wilayahnya maupun di titik masuk, terutama di perbatasan dan tempat penampungan. Migran sering kali diperlakukan sebagai pihak yang pasif, yang harus dipindahkan atau ditahan di lokasi tertentu, yang pada akhirnya mengurangi kebebasan dan agensi mereka. Mekanisme kontrol spasial yang ketat ini seperti penempatan migran di zona transit atau tempat penahanan, semakin memperburuk martabat mereka, menjadikan mereka lebih sebagai objek yang harus dikelola ketimbang individu yang berhak atas perlindungan. Kontrol temporal juga menjadi bagian penting dalam pendekatan pakta ini terhadap migrasi. Uni Eropa berusaha mempercepat proses suaka dan deportasi dengan menekankan efisiensi. Meskipun ini diklaim untuk mempercepat proses bagi migran, kenyataannya bisa membatasi hak mereka. Prosedur yang dipercepat sering kali menyebabkan keputusan yang terburu-buru,

mengurangi kesempatan migran untuk mengajukan banding atau mendapat perlindungan yang seharusnya mereka terima. Dengan waktu yang terbatas, agensi migran menjadi sangat dibatasi, membuat mereka semakin terkurung dalam sistem yang lebih mengutamakan kecepatan daripada keadilan (Häkli et al., 2024). Walaupun pakta ini mengklaim ingin mengimbangi kebutuhan akan kontrol dan perlindungan hak asasi manusia, dalam praktiknya lebih banyak menekankan efisiensi dan pengendalian. Hal ini menyebabkan migran sering kali diperlakukan lebih sebagai masalah yang harus diatasi ketimbang individu yang membutuhkan perlindungan.

## **B. Tanggapan Negara Anggota Uni Eropa terhadap Reformasi Pakta Migrasi dan Suaka 2024**

Reformasi kebijakan migrasi dan suaka Uni Eropa yang diusulkan melalui Pakta Migrasi dan Suaka 2024 telah memicu berbagai reaksi di antara negara-negara anggota, yang mencerminkan keberagaman pandangan dan posisi yang ada. Ketegangan yang timbul dalam respons terhadap kebijakan ini menggambarkan kompleksitas situasi migrasi di Eropa dan mengungkapkan ketidaksetujuan yang signifikan mengenai bagaimana pengelolaan migrasi harus dilakukan (Roßkopf, 2024). Negara-negara dengan perbatasan eksternal yaitu seperti Italia, Yunani, dan Spanyol di mana seringkali berada di garis depan dalam menghadapi lonjakan migran yang memasuki wilayah Eropa. Negara-negara ini yang berfungsi sebagai titik masuk utama bagi migran yang mencoba mencapai Eropa, merasa tertekan oleh ketimpangan beban yang mereka tanggung dalam menangani jumlah pencari suaka yang besar. Pada sisi lain bahwa negara-negara yang tidak langsung terpengaruh oleh migrasi massal, seperti negara-negara Eropa utara dan timur lebih cenderung untuk menanggapi reformasi ini dengan skeptisisme, terutama terkait dengan pembagian kuota pengungsi. Perbedaan politik di antara negara-negara anggota semakin memperburuk ketegangan ini, dengan beberapa negara menilai kebijakan ini sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial mereka, sementara yang lain menilai kebijakan tersebut sebagai langkah yang diperlukan untuk menghadapi tantangan migrasi yang terus meningkat (CURIARATIONUM, 2023).

Salah satu isu paling kontroversial terkait dengan reformasi ini adalah sistem kuota pengungsi yang diusulkan, yang bertujuan untuk membagi beban migrasi secara lebih merata di antara negara-

negara Uni Eropa. Beberapa negara anggota, terutama negara-negara di Eropa Timur seperti Polandia dan Hungaria menentang keras kewajiban untuk menerima migran yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Negara-negara ini berargumen bahwa kewajiban tersebut bertentangan dengan kedaulatan nasional mereka, serta menimbulkan risiko sosial dan budaya yang signifikan. Negara-negara tersebut khawatir bahwa menerima migran dalam jumlah besar dapat mempengaruhi identitas nasional mereka dan memicu ketegangan sosial. Sebagai alternatif, negara-negara ini lebih memilih untuk mendukung upaya mitigasi migrasi melalui bantuan ke negara-negara asal atau mengalokasikan dana untuk mengelola migrasi di luar perbatasan Uni Eropa. Meskipun mekanisme solidaritas yang diusulkan memberikan fleksibilitas, di mana negara-negara yang menolak menerima migran dapat memilih untuk membayar denda atau mendukung proyek di negara asal migran, efektivitas dari pendekatan ini masih diragukan. Fleksibilitas ini menciptakan ketidakpastian dalam implementasi, karena tidak ada jaminan bahwa negara-negara yang tidak bersedia menerima migran akan secara konsisten berkontribusi untuk mendukung program solidaritas.

Keberatan yang diungkapkan oleh negara-negara Eropa Timur seperti Polandia dan Hungaria, terhadap kewajiban pembagian pengungsi menunjukkan adanya perbedaan yang dalam dalam sikap politik mengenai isu migrasi. Polandia dan Hungaria, yang dikenal dengan sikap konservatif mereka terhadap migrasi, berargumen bahwa kewajiban untuk menerima pengungsi dapat merusak keamanan dan kestabilan sosial mereka. Mereka juga menekankan pentingnya perlindungan budaya dan integritas sosial dalam menghadapi gelombang migrasi yang besar (Badell, 2020). Isu ini semakin diperburuk dengan adanya retorika politik yang mengaitkan migrasi dengan ancaman terhadap nilai-nilai tradisional dan identitas nasional. Sementara itu, negara-negara Eropa Selatan seperti Italia, Yunani, dan Spanyol yang berada di garis depan menghadapi tantangan besar dalam mengelola aliran migrasi sehingga mendesak lebih banyak solidaritas dari negara-negara anggota lainnya (IDN TIMES, 2024). Ketegangan tersebut mengarah pada kesulitan dalam mencapai kesepakatan yang solid dan dapat diterima oleh semua negara anggota, yang berpotensi memperlambat implementasi Pakta Migrasi dan Suaka yang baru ini.

Meskipun adanya ketegangan, beberapa negara Uni Eropa lainnya, terutama di Eropa Utara dan Barat, seperti Jerman dan Prancis menyambut baik

langkah-langkah yang diusulkan dalam pakta tersebut, dengan harapan bahwa mekanisme solidaritas yang lebih terstruktur akan mempercepat pengelolaan aliran migran. Negara-negara ini melihat bahwa sistem yang lebih homogen dan terstandarisasi dalam pengelolaan suaka akan mengurangi ketidakaturan yang ada pada sistem sebelumnya, di mana negara-negara dengan perbatasan eksternal harus menanggung beban yang tidak proporsional. Mereka percaya bahwa dengan redistribusi pengungsi yang lebih adil, ketegangan sosial yang muncul akibat ketidakseimbangan beban migrasi dapat berkurang (Karageorgiou, 2020). Namun, meskipun negara-negara ini mendukung reformasi, tantangan besar tetap ada, terutama terkait dengan implementasi kebijakan dan penyesuaian infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung prosedur baru ini.

Implementasi praktis dari reformasi ini bergantung pada kesiapan negara-negara anggota dalam mengadaptasi infrastruktur perbatasan mereka dan menyusun prosedur administratif yang lebih efisien. Negara-negara dengan perbatasan eksternal, seperti Italia, Yunani, dan Spanyol, harus mengelola migran yang memasuki wilayah mereka, dan mereka menghadapi tantangan besar dalam memastikan bahwa prosedur penyangkutan dapat dijalankan dengan baik. Tantangan ini menjadi lebih rumit dengan meningkatnya jumlah migran yang harus diproses serta kebutuhan untuk memastikan bahwa sistem suaka di Uni Eropa dapat berfungsi secara lebih efisien dan efektif. Negara-negara ini juga harus menyesuaikan kapasitas mereka untuk menampung migran baik secara fisik melalui pembangunan pusat penahanan atau tempat penampungan, maupun secara administratif melalui peningkatan sistem digital dan database untuk memantau migran (Echeverría et al., 2024). Salah satu pembaruan yang penting adalah pengembangan sistem Eurodac yang lebih canggih, yang memungkinkan pemantauan lebih efektif terhadap pergerakan migran di seluruh kawasan Schengen. Namun, meskipun langkah-langkah ini penting, keberhasilan implementasi bergantung pada kemampuan negara-negara anggota untuk bekerja sama dan beradaptasi dengan kebijakan yang diusulkan (Bredström et al., 2022).

Tantangan praktis lainnya terletak pada perbedaan kesiapan administrasi di negara-negara anggota untuk menangani prosedur suaka yang lebih terstruktur. Beberapa negara anggota mungkin tidak memiliki sumber daya atau sistem administratif yang memadai untuk mendukung implementasi kebijakan ini. Prosedur suaka yang lebih terstandarisasi dan lebih cepat memerlukan

infrastruktur yang lebih efisien dan personel yang terlatih. Oleh karena itu, negara-negara yang tidak terpengaruh secara langsung oleh migrasi massal mungkin tidak memiliki kapasitas yang diperlukan untuk mendukung perubahan ini. Negara-negara yang terletak di perbatasan eksternal Uni Eropa akan menghadapi beban lebih besar dalam hal sumber daya dan kesiapan administratif, yang dapat menambah ketegangan politik antara negara-negara anggota dan memperburuk ketidaksetujuan terkait pembagian beban migrasi.

## V. KESIMPULAN

Reformasi Pakta Migrasi dan Suaka Uni Eropa 2024 bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan migrasi yang lebih terstruktur dan efisien di Uni Eropa, dengan mengatasi ketidakseimbangan beban antara negara-negara anggota. Kebijakan ini mengusung prinsip solidaritas dan tanggung jawab bersama yang dimaksudkan untuk mengurangi ketegangan yang terjadi antara negara-negara dengan perbatasan eksternal, seperti Italia, Yunani, dan Spanyol, dan negara-negara anggota lainnya. Meskipun pakta ini mencakup sejumlah regulasi baru yang lebih ketat yaitu seperti prosedur penyaringan dan mekanisme redistribusi migran, implementasinya tetap menghadapi tantangan besar, terutama terkait dengan perbedaan pandangan antara negara-negara anggota Uni Eropa.

Perbedaan politik dan ideologi, khususnya dari negara-negara Eropa Timur seperti Polandia dan Hungaria yang menentang pembagian kuota pengungsi secara proporsional, menciptakan ketegangan internal yang dapat menghambat kesepakatan dan implementasi kebijakan ini. Ketidaksetujuan ini dapat mempengaruhi efektivitas solidaritas antar negara anggota, yang menjadi kunci utama keberhasilan pakta ini. Selain itu, tantangan praktis dalam hal infrastruktur perbatasan, kesiapan administratif, dan pelaksanaan prosedur suaka yang lebih terstruktur memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup. Oleh karena itu, meskipun reformasi ini memiliki potensi untuk menciptakan sistem migrasi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan, kesuksesan implementasinya sangat bergantung pada komitmen dan kerjasama yang kuat antara negara-negara anggota Uni Eropa serta penanganan terhadap ketegangan politik yang ada.

## REFERENSI

[1] Badell, D. (2020). The EU, migration and

contestation: the UN Global Compact for migration, from consensus to dissensus. *Global Affairs*, 6(4-5), 347-362. <https://doi.org/10.1080/23340460.2020.1871301>

- [2] Bast, J., de Oliveira, P. E., & Wessels, J. (2023). Enhancing the Rights of Protection-Seeking Migrants through the Global Compact for Migration: The Case of EU Asylum Policy. *International Journal of Refugee Law*, 35(4), 461-474. <https://doi.org/10.1093/ijrl/ead007>
- [3] Bredström, A., Krifors, K., & Mešić, N. (2022). Border Reconfiguration, Migration Governance, and Fundamental Rights: A Scoping Review of EURODAC as a Research Object. *Social Inclusion*, 10(3), 68-81. <https://doi.org/10.17645/SI.V10I3.5398>
- [4] CURIARATIONUM. (2023). *Migration policy and the EU*. 1-144.
- [5] Echeverría, G., Abbondanza, G., & Finotelli, C. (2024). The Externalisation Gamble: Italy and Spain at the Forefront of Maritime Irregular Migration Governance. *Social Sciences*, 13(10). <https://doi.org/10.3390/socsci13100517>
- [6] Enríquez, C. G. (2024). *The EU Pact on Migration and Asylum: context, challenges and limitations*. Real Instituto Alcano Royal Institute. <https://www.realinstitutoelcano.org/en/analyses/the-eu-pact-on-migration-and-asylum-context-challenges-and-limitations/>
- [7] European Commission. (2024). *Pact on Migration and Asylum*. [https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/pact-migration-and-asylum\\_en#timeline-and-main-achievements](https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/pact-migration-and-asylum_en#timeline-and-main-achievements)
- [8] Essarraoui, S. (2024). *Moroccan Journal for Research in the Humanities and Social Sciences*. 03(Septembre), 280-293.
- [9] Fauzan Alamari, M. (2020). Imigran dan Masalah Integrasi Sosial. *Jurnal Dinamika Global*, 5(2), 254-277.
- [10] Ferris, E. G., & Donato, K. M. (2019). *Refugees, migration and global governance: Negotiating the Global Compacts*. Routledge.

- [11] Häkli, J., Kudžmaitė, G., & Kallio, K. P. (2024). Devaluing personhood: The framing of migrants in the EU's new pact on migration and asylum. *Transactions of the Institute of British Geographers*, January, 1–15. <https://doi.org/10.1111/tran.12676>
- [12] IDN TIMES. (2024). *Polandia Tidak Akan Terima Migran Baru dari Kebijakan UE*. <https://www.idntimes.com/news/world/bram-1/polandia-tidak-akan-terima-migran-baru-dari-kebijakan-ue-c1c2>
- [13] Jamal, C. A., Windiani, R., & Paramasatya, S. (2022). Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Menjadikan Guatemala Sebagai Safe Third Country dalam Upaya Penanganan Arus Migrasi (2019-2020). *Journal of International Relations*, 8, 232–238. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi> Website: <http://www.fisip.undip.ac.id>
- [14] Karageorgiou, E. (2020). Guest Note on the New Pact on Migration and Asylum. *Nordic Journal of European Law*, 3(2), 2–3. <https://doi.org/10.36969/njel.v3i2.22396>
- [15] Kaufmann, D. K. (2024). *Apa Isi Pakta Migrasi Uni Eropa?* DW. <https://www.dw.com/id/apa-isi-pakta-migrasi-uni-eropa/a-68796318>
- [16] Klöcker, J. A., & Daumann, F. (2023). What drives migration to Germany? A panel data analysis. *Research in Economics*, 77(2), 251–264. <https://doi.org/10.1016/j.rie.2022.10.002>
- [17] Lücke, M., Neidhardt, A. H., ÖZÇÜRÜMEZ, S., RUHS, M., & SUNDBERG DIEZ, O. (2021). *EU-Turkey: Toward sustainable cooperation in migration management and refugee protection*. MEDAM.
- [18] Roßkopf, R. (2024). The EU Pact on Migration and Asylum: An Overview. *Quarterly on Refugee Problems*, 63(2), 184–203.
- [19] Salsabila, S., & Latipulhayat, A. (2021). Perlindungan Pencari Suaka di Laut Lepas Eropa Ditinjau Dari Hukum Pengungsi di Eropa Dan Hukum Laut Internasional. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(3). <https://doi.org/10.29303/ius.v9i3.958>
- [20] Setiabudi, C. S. (2021). Pengaruh Kebijakan Pengungsi Uni Eropa Terhadap Perkembangan Gerakan Eurosceptic Di Eropa. *Wanua : Jurnal Hubungan Internasional Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin*, 6(1), 81.
- [21] Stepka, M. (2023). The New Pact on Migration and Asylum: Another Step in the EU Migration-Security Continuum or Preservation of the Status Quo?. *Białostockie Studia Prawnicze*, 1(28), 23–37.
- [22] Thym, D. (2022, February). Never-ending story? Political dynamics, legislative uncertainties, and practical drawbacks of the ‘new’ pact on migration and asylum. In *Reforming the Common European Asylum System* (pp. 11–32). Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG.
- [23] Wangke, H. (2016). Krisis Migran Dan Masa Depan Integrasi Uni Eropa. *Info Singkat*, VIII(03), 8. [www.pengkajian.dpr.go.id](http://www.pengkajian.dpr.go.id) ISSN
- [24] Wolff, S. (2024). The New Pact on Migration: Embedded Illiberalism? *Journal of Common Market Studies*, 62, 113–123. <https://doi.org/10.1111/jcms.13669>